KIAI DAN KONFLIK ELITE POLITIK LOKAL DI BANYUWANGI

Ali Maksum
Dosen Tetap Fak. Tarbiyah LAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

This study focuses on the involvement of "kiai" in the political conflict of political elite in the region of Banyuwangi. Political conflict which was the effect of the direct election of the local government leader had involved not only the elite but also the people in general. A number of "kiai" failed in overcoming the problems and their involvement made the conflict even worse. The fact that the conflict in Banyuwangi was becoming worse and worse was caused by the decision of Local Election Commission (KPUD) which was controversial. Some efforts had been done but the result was not satisfied all elements, and thus the conflict reached its top, and now disappeared by itself. The people get bored with the conflict at last

Kata kunci: *Kiai, Konflik Elite Politik Lokal dan Pilkada.*

PENDAHULUAN

Studi ini dimaksudkan untuk mengeksplorasikan dan mendiskripsikan tentang kiai dan konflik elite politik lokal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian, karena konflik politik dalam pilkada di Banyuwangi sangat kompleks dan berlarut-larut sehingga menyebabkan perpecahan di masyarakat, dan tidak saja bernuansa politik, tetapi juga bernuansa non-politik.

Konflik elite politik lokal merupakan salah satu bentuk dari konflik yang menarik sejumlah akademisi untuk menelitinya. Studi-studi tentang konflik politik elit lokal merangkum beberapa perspektif: *Pertama*, studi tentang "Konflik Elite Lokal", oleh Andi Suwatko (2002), memotret konflik dalam proses pemilihan Bupati Mojokerto, yang melibatkan konflik antara elit partai politik, birokrasi, organisasi keagamaan, militer, dan LSM. Elit lokal gagal menjalin koalisi kelembagaan untuk pemenangan pemilihan Bupati, karena intensitas konflik internal. Beberapa upaya

yang dilakukan oleh elit lokal pasca gagal koalisi adalah praktek politik uang, lari ke tokoh spiritual dan paranormal. Cara elit lokal untuk mengatur konflik adalah konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi.

Kedua, Moekmina (2003) yang meneliti "Konflik Kepentingan di DPRD Jawa Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur". Studi ini memetakan pola tarik-menarik antar elit kelompok di DPRD dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur pada tahun 2003.

Ketiga, studi terkini tentang konflik elit politik lokal dilakukan oleh Moch. Nurhasim, dan kawan-kawan, di empat daerah, yaitu pemilihan bupati di Sampang tahun 2000, pemilihan wali kota Surabaya tahun 1999, pemilihan gubernur di Maluku Utara tahun 2001, dan pemilihan gubernur di kalimantan tengah tahun 2000. Hasil penelitian ini kemudian diterbitkan dengan judul buku "*Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Nurhasim (ed.), 2005). Hasil studi di empat wilayah tersebut menyimpulkan: (1) konflik terjadi karena faktor kepentingan antara elit lokal yang bertarung, kepentingan politik elit nasional, kepentingan pengusaha, dan kepentingan politik lain di daerah yang tidak dapat dipertemukan. (2) salah penafsiran terhadap implementasi UU yang mengatur pemilihan kepala daerah. (3) lemahnya konsolidasi demokrasi di masa transisi dan rendahnya institusionalisasi proses demokrasi di tingkat lokal, menjadi faktor dominan munculnya konflik antarkekuatan politik.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: (1) penelitian sebelumnya dilakukan sebelum adanya perubahan sistem politik terkini di Indonesia, yakni Pilkada langsung. Studi-studi tersebut, memotret konflik elit lokal yang terjadi antara tahun 1999 sampai 2004. Padahal, Pilkada langsung baru dimulai pada Juni 2005. Sehingga studi tentang konflik politik elit lokal dalam Pilkada langsung belum banyak dilakukan. (2) pada penelitian sebelumnya, pemilihan bupati masih menggunakan sistem parlementer, yakni kepala daerah/ bupati dipilih oleh anggota DPRD, sementara dalam penelitian ini kepala daerah/ bupati dipilih langsung oleh rakyat.

Berdasarkan catatan di atas, studi ini mengisi ruang kosong tentang konflik politik elit lokal setelah momentum suksesi kepemimpinan kepala daerah secara langsung diberlakukan sejak bulan Juni 2005. Studi ini akan mengeksplorasi dan mendeskripsikan konflik politik elit lokal di Banyuwangi.

Pilkada langsung di kabupaten Banyuwangi digelar pada tanggal 20 Juni 2005. Konflik Pilkada kabupaten Banyuwangi menarik untuk diteliti karena

konfliknya bersifat kontinyu (terus-menerus)—terjadi pada *pra* dan *pasca* Pilkada. *Pertama*, konflik yang terjadi pada masa *pra* pilkada, seperti (1) konflik penetapan calon kontestan, baik oleh KPUD maupun oleh partai politik. KPUD misalnya menolak calon yang diajukan oleh PKB, sementara PDIP menolak calon pasangan Ratna – Yusuf Noer Iskandar (Yusuf Noeris), yang ternyata berhasil memenangkan pilkada. (2) curi start kampanye. Pelanggaran curi start kampanye dapat menimbulkan konflik antar pendukung di masyarakat, (*Kompas*, Sabtu, 30 April 2005). (3) empat pejabat Sekretariat KPUD Banyuwangi mengundurkan diri. Di duga, mereka dipaksa mengundurkan diri untuk menggagalkan Pilkada Kabupaten Banyuwangi 2005-2010, (*Kompas*, selasa 3 Mei 2005). (4) selama satu pekan kantor KPUD Banyuwangi diduduki massa dari PKB karena calon bupati yang mereka ajukan yakni Samsul Hadi (*incumbent*) ditolak KPUD karena dianggap tidak sah, (*Jawa Pos*, Senin 6 Juni 2005 & Kamis 26 Mei 2006). (3) Konflik internal partai, yakni di tubuh PDIP dan PKB sejak awal menjadikan konflik semakin rumit. Konflik PDIP berawal dari ditolaknya pasangan calon bupati Ratna Ani Lestari dan Yusuf Noeris yang masuk lewat pintu PDIP oleh DPP PDIP, meskipun pasangan ini memenangkan konferensi cabang. Elit PDIP di Jakarta mempunyai jago sendiri yakni Ali Sa'roni dan Yusuf Widiatmoko. Orang-orang PDIP daerah yang tidak sepakat dengan pusat akhirnya ikut di balik kesuksesan Ratna-Yusuf, (*Kompas*, 8 Juli 2005). Sementara dualisme PKB yang punya calon sendiri-sendiri, menjadikan suara kontituen PKB pecah. Kiai dan warga NU sebagai konstituen PKB pun bercerai-berai dan terlibat dalam aksi dukung-mendukung calon yang berbeda.

Kedua, konflik *pasca* pilkada, misalnya: (1) penolakan DPRD dan kiai atas kemenangan pasangan Ratna – Yusuf, (*Jawa Pos*, Kamis 22 September 2005 & 18 oktober 2005). (2) merebaknya spanduk provokatif yang dipasang di jalan-jalan strategis yang berbau hasutan untuk menolak Ratna Ani Lestari. Bunyi spanduk, antara lain: *Ratna dilantik Banyuwangi banjir darah; Banyuwangi tidak ingin dipimpin bupati murtad; dan Banyuwangi tidak mau dipimpin bupati zina*, (*Jawa Pos*, Kamis 22 September 2005). (3) munculnya elemen-elemen masyarakat pro-Ratna, seperti Forum Elemen Masyarakat Banyuwangi, LSM Konsorsium Demokrasi untuk Banyuwangi, Paguyuban Pengusaha Jamu Tradisional, PGRI, Forum Suara Rakyat Suara Tuhan, perwakilan ulama dan kiai, unsur dinas dan instansi pemkab, unsur kepala desa, PWRI, IBI, dan unsur pengusaha, (*Jawa Pos*, Rabu 5 Oktober 2005). Kelompok-kelompok masyarakat yang pro ini berhadapan dengan kelompok masyarakat lain yang kontra bupati terpilih, seperti Forum Silaturrahmi Ulama

Banyuwangi (FSUB) dan massanya, beberapa LSM, dan tokoh agama (*Jawa Pos*, Selasa 30 Agustus 2005 & Kamis 1 September 2005).

Dari uraian di atas, konflik politik antar elit lokal di Banyuwangi sangat kompleks, karena tidak saja bernuansa politik tetapi juga non-politik (SARA). Sejumlah politisi, tokoh-tokoh agama, dan sebagian masyarakat meniupkan isu-isu agama bupati terpilih. Pilkada yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan Ratna - Yusuf ini tergolong dramatis karena pasangan ini diusung oleh 18 partai kecil non-parlemen. Permasalahan tidak berhenti sampai ditetapkannya pasangan yang menang oleh KPUD, tetapi konflik terus berkepanjangan karena DPRD dan tokoh-tokoh agama (Islam; kiai) menolak pelantikan Ratna-Noeris, (*Kompas*, 8 Juli 2005; *Jawa Pos*, Rabu, 5 Oktober 2005).

Berdasarkan pada pemikiran di atas, penelitian tentang kyai dan konflik politik elit lokal dalam Pilkada langsung di Banyuwangi, penting untuk dilakukan. Bagaimana pola keterlibatan kyai dalam konflik politik elit lokal dalam Pilkada langsung di Banyuwangi dan upaya penyelesaiannya perlu diketahui.

GAMBARAN SOSIO-KULTURAL DAN EKONOMI-POLITIK BANYUWANGI

Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Daerahnya terbagi atas daerah dataran tinggi dan daerah datar. Daerah tinggi, berupa daerah pegunungan, merupakan daerah penghasil berbagai produksi perkebunan. Daerah datar, merupakan daerah persawahan yang menghasilkan aneka produksi tanaman pertanian dan daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Secara sosial-politik, Banyuwangi merupakan lahan politik kaum Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama (NU) melalui bendera politiknya PKB. Melaui dua Pemilu, yakni Pemilu 1999 dan 2004 , PKB selalu nomor satu. Pada Pemilu 1999, PKB memperoleh 15 kursi di DPRD, PDIP 11 kursi, dan Golkar 5 kursi. Sementara pada Pemilu 2004 menduduki posisi teratas dengan memperoleh 16 kursi, tambah satu kursi dari Pemilu 1999. Urutan kedua tetap diduduki PDIP dengan 12 kursi, bertambah satu kursi dari Pemilu 1999. Golkar memperoleh tambahan relative besar, yakni 3 kursi, dari 5 kursi pada Pemilu 1999 menjadi 8 kursi pada Pemilu 2004.

Tabel 1
Anggota DPRD Hasil Pemilu 2004

Secara sosial-budaya, di Banyuwangi terdapat tiga kelompok etnis: Osing,

No.	Partai Politik	Anggota DPRD	Prosentase (%)
1.	PKB	16	36
2.	PDIP	12	27
3.	Partai Golkar	8	18
4.	PD	5	11
5.	PPP	4	8
	Jumlah	**45**	**100**

Jawa, dan Madura. Suku Osing adalah suku minoritas yang hingga kini masih eksis. Suku ini menyebar di beberapa tempat di Banyuwangi, terutama di desa Kemiren, Banyuwangi Barat. Di desa yang berjarak tujuh kilometer dari pusat kota Banyuwangi ini, berdiam 2,4 ribu jiwa warga suku Osing. Keturunan suku Osing juga berdiam di desa Aliyan, 14 km dari pusat kota Banyuwangi. Di desa itu jumlah penduduknya 4,8 jiwa, hampir separuhnya merupakan keturunan suku Osing.

Suku yang terkenal dengan dialek dan bahasa Osing itu konon adalah keturunan langsung dari Kerajaan Blambangan, salah satu kerajaan kecil di Jawa Timur yang hadir sekitar abad ke 18. Kerajaan yang didirikan oleh Raja Wiraraja itu adalah bagian dari kerajaan Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, wilayah kerajaan Blambangan menjadi rebutan kerajaan kecil di Bali, Pasuruan, dan Mataram Islam.

Belum lagi konflik perebutan kekuasaan itu usai, daerah Blambangan yang dikenal subur itu (*Blambangan* dari kata *Balumbung* atau daerah *Lumbung Padi*) menjadi sasaran penjajah Belanda melalui VOC-nya. Jepitan sejarah itu yang akhirnya membuat masyarakat Blambangan menjadi resisten terhadap kekuasaan di luar Blambangan. Muncullah istilah *Osing* atau *Using* yang artinya "*tidak berpihak*".

Entah mengapa, sejarah suram yang dirasakan oleh keturunan Blambangan seakan terus berulang menimpa masyarakat suku Osing dan wilayah Banyuwangi pada umumnya. Ketika tahun 1965 misalnya, pasca pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI), penduduk di daerah yang berbatasan dengan Pulau Bali itu banyak menjadi korban. Sebagai catatan, lagu genjer-genjer yang sering dinyanyikan anggota PKI, adalah ciptaan warga Banyuwangi.

Begitu juga di tahun 1998, ketika tiba-tiba tersiar isu ilmu hitam/santet. Warga Osing dan warga Banyuwangi yang dikenal piawai ilmu kanuragan/kesaktian menjadi sasaran pembunuhan. Diperkirakan ada 150 orang yang dituduh sebagai dukun santet dibunuh oleh segerombolan orang berpakaian ala ninja. "Banyaknya peristiwa itu yang membuat orang Osing makin terpinggirkan", kata Hasnan Singodimayan, 75, salah satu sesepuh dan tokoh Osing.

Semua sejarah kelam itu coba dikubur pada tahun 2002 bertepatan dengan Ulang Tahun Banyuwangi ke 232, Bupati Banyuwangi ketika itu, Ir. Samsul Hadi, membuat langkah membangkitkan tradisi suku Osing di kota itu. Seperti menjadikan bahasa Osing sebagai bahasa resmi daerah dan diajarkan di sekolah. Juga mengganti lambang kota yang awalnya Ular Berkepala Gatotkaca diganti Penari Gandrung Khas Osing.

Awalnya, upaya untuk membangkitkan keosingan di Banyuwangi disambut gembira oleh masyarakat setempat. Bahasa Osing yang awalnya hanya digunakan oleh komunitas Osing, mulai banyak digunakan oleh masyarakat Banyuwangi lain. Namun di balik itu, penolakan-penolakan mulai bermunculan. Khususnya daerah yang etnis jawa dan Maduranya lebih mendominasi.

Upaya mengubur sejarah kelam, ternyata tidak membuahkan hasil. Justru semenjak diberlakukan otonomi daerah konflik antarelit memperebutkan kekuasaan dan pos-pos strategis di Banyuwangi semakin tajam. Terlebih sejak tahun 2005, ketika Pilkada dilaksanakan untuk pertama kalinya di Banyuwangi, konflik antarelit dan massa semakin tidak terkendali. Konflik dari waktu ke waktu semakin besar dan meluas, tanpa ada tanda-tanda akan berakhir.

POTRET PROSES PILKADA BANYUWANGI

Pemilihan Bupati langsung di Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2005, merupakan pengalaman yang pertama kali di kota Gandrung. Melalui Pilkada langsung, elit politik lokal di Banyuwangi mempunyai kesempatan untuk bersaing memperebutkan jabatan politik tertinggi di daerah. Dengan demikian, Pilkada langsung membawa gairah politik lokal ke arah yang dinamis. Bahkan interaksi dan proses politik di antara elit politik lokal mengalami peningkatan, penuh perdebatan bahkan konfliktual. Kekuatan-kekuatan masyarakat melalui partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa serta media elektronik tampil dalam arena percaturan politik lokal.

Pilkada di Banyuwangi diikuti oleh lima konstentan. Kelima pasangan peserta dan partai politiknya secara berurutan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Pasangan Calon Bupati Banyuwangi 2005-2010

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Ir. H.A. Wahyudi dan Ir. HM. Eko Sukartono	PKB
2	Ir. H. Soesanto Suwandi, MM dan Drs. H. Abdul Kadir, M.Si	Partai Golkar
3	H. Ali Sa'roni, SH, MM. dan Yusuf Widiyatmoko, S.Sos,	PDIP
4	Drs. H. Masduki Suud, MM dan Drs. H. Syafi'i Asyari	Partai Demokrat dan PPP
5	Ratna Ani Lestari, SE, MM dan Yusuf Nuris, SH, MH,	Gabungan Partai Non Parlemen

Pragmatisme Politik

Asal-usul konflik, bermula dari perseteruan antarelit politik dalam konflik pemilihan bupati Banyuwangi dilandasi oleh kepentingan pragmatis politis dan juga kepentingan ekonomi politik. Konflik yang dilandasi oleh kepentingan pragmatis politis, berawal dari konflik internal PKB yang pecah menjadi dua faksi, yakni faksi Ir. Samsul Hadi (bupati *incombent* saat itu) melawan faksi Ir. A. Wahyudi (ketua DPC PKB dan Ketua DPRD Banyuwangi) yang mencalonkan diri sebagai bupati. Baik Samsul maupun Wahyudi, keduanya didukung oleh para kyai dan massa yang sama-sama besarnya. Sementara secara ekonomi politik, semua kontestan pilkada bupati Banyuwangi berebut untuk menjadi orang nomor satu dan berusaha menguasai pos-pos strategis di Banyuwangi.

Konflik internal PKB memunculkan dua kandidat, yakni PKB kubu Gus Dur-Muhaimin Iskandar mencalonkan Samsul Hadi sebagai calon bupati dengan wakilnya Gatot Sirajuddin. Sedangkan PKB kubu Alwi Shihab-Khoirul Anam,

yang dipimpin KH. Abdullah Faqih mencalonkan A. Wahyudi sebagai calon bupati dengan wakilnya Eko Sukartono. Konflik internal partai di tubuh PKB ini tidak bisa diselesaikan secara internal.

Sebagai ketua DPC PKB dan ketua DPRD Banyuwangi, tentu posisi Wahyudi cukup kuat dan kritik-kritiknya tentu akan mempengaruhi citra Samsul Hadi di mata masyarakat. Karena itu, Samsul Hadi, yang konon sangat dekat dengan Gus Dur, mengusulkan agar kepengurusan A. Wahyudi di PKB Banyuwangi dibekukan. DPP PKB pusat merespon usulan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan No.01706/DPP-02/III/A.I/III/2004 tertanggal 6 September 2004, membekukan kepengurusan DPC PKB Banyuwangi hasil Muscab Minak Jinggo yang dipimpin oleh KH. Abdullah Faqih (Dewan Syura) dan A. Wahyudi (Dewan Tanfidz).

Dengan demikian, konflik A. Wahyudi dengan Samsul Hadi telah merembet ke konflik antara A. Wahyudi dengan DPP PKB di Jakarta. Melalui SK No. 01949/ DPP-02/III/A.I/III/2005, DPP PKB tertanggal 29 Maret 2005, mencabut Keanggotaan A. Wahyudi sebagai anggota PKB. Melalui SK tersebut, A. Wahyudi dilarang menggunakan untuk kepentingan apa pun dengan mengatasnamakan PKB. Konflik lokal telah diintervensi oleh pusat. Transisi politik dan intervensi elit nasional membuka peluang bagi terjadinya konflik elit dalam pemilihan bupati di Banyuwangi menjadi lebih besar.

Kubu A.Wahyudi bergeming dan tidak mengindahkan SK Pembekuan dan Pencabutan keanggotaan tersebut. A. Wahyudi tetap memimpin PKB di Banyuwangi. Pada waktu penjaringan calon bupati dan wakil bupati, A. Wahyudi mendaftarkan diri sebagai calon bupati berpasangan dengan Eko Sukartono (Golkar). Sementara DPP PKB mengeluarkan Surat Keputusan No.01933/DPP-02/III/A.I/III/2005 tertanggal 23 Maret 2005 tentang penetapan Samsul Hadi sebagai calon bupati dan Gatot Sirojuddin sebagai wakil bupati Banyuwangi periode 2005-2010.

Dualisme PKB yang ada di Banyuwangi tidak dapat diselesaikan secara internal partai. Sampai detik-detik akhir masa pendaftaran, konflik internal PKB belum terselesaikan dan KPU pun akhirnya menggunakan hak otoritatifnya untuk melakukan eksekusi terhadap berbagai konflik internal PKB. KPUD kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Surat Keputusan KPUD Nomor 07 Tahun 2005 tentang Penetapan Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Banyuwangi yang berhak mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2010. Dengan sikap otoritatifnya, KPUD memutuskan PKB versi Muktamar Surabaya yang dipimpin KH. Abdullah Faqih dan Ir. H.A. Wahyudi yang berhak mencalonkan bupati dan wakilnya. KPUD tentu telah berhitung, bahwa A. Wahyudi mempunyai kekuatan riil di dewan, yakni semua anggota dewan dari PKB berjumlah 16 orang semua ada di belakang A. Wahyudi. Berawal dari kebijakan KPUD ini konflik mulai muncul kepermukaan dan terus menggelinding laksana bola salju.

Konflik internal PKB tersebut apabila diskemakan sebagai berikut:

Skema 1
Peta Konflik Internal DPC PKB

DPP PKB Gus Dur- Muhaimin

DPP PKB Chairul Anam

KONFLIK

Samsul Hadi Cs

A. Wahyudi Cs

Pasca penetapan pasangan calon, stabilitas politik Banyuwangi memanas seperti api dalam sekam. Hal itu terbukti dengan munculnya aksi unjuk rasa massa pendukung calon Bupati Ir. Syamsul Hadi yang merasa dipecundangi oleh KPUD. Massa pendukung Ir. Syamsul Hadi melakukan protes keras karena KPUD telah melampaui wewenang, sementara PKB mana yang berhak mengajukan calon masih menunggu proses hukum di pengadilan. KPUD pun bergeming, dan terus berjalan pada keputusannya.

Akibat keputusan kontroversial KPUD Banyuwangi, massa Samsul Hadi dan sejumlah kyai pendukung tidak puas. Maka, massa ini kemudian mengepung dan menduduki kantor KPUD sampai satu minggu. KH. Ali Sudarji yang memimpin pengepungan tersebut, menyebut KPUD telah berbuat curang dan proses pencalonan harus diulang. Aktivitas KPUD lumpuh dan kemudian dipindahkan ke gendung DPRD Kabupaten Banyuwangi lebih dari satu bulan. Pindahnya aktivitas KPUD ke gedung DPRD dan tidak ke gedung yang lain,

dipahami para pendukung Samsul Hadi sebagai "konspirasi politik" untuk menjegal pencalonannya. KPUD dituduh ada "main mata" dengan ketua DPRD A. Wahyudi, (Wawancara dengan Taufiq, tokoh LSM, 19 April 2006).

Konflik internal PKB, menyebabkan kyai-kyai di Banyuwangi terpecah-pecah dan terlibat dalam aksi dukung-mendukung calon. Kultur pemahaman agama yang masih feodalistik, yang ditandai hubungan *patron-klien* masih sangat kuat, menjadikan sejumlah kyai dan massa pengikutnya saling berhadap-hadapan karena perbedaan aspirasi politik dan calon yang didukungnya tidak sama.

KETERSINGGUNGAN POLITIK

Atas dasar hasil rekapitulasi akhir, maka KPUD Banyuwangi menetapkan Ratna Ani Lestari, SE, MM dan Yusuf Nuris, SH, MH sebagai pemenang Pilkada Banyuwangi 2005-2010. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Terpilih ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuwangi pada hari Rabu 29 Juni 2005. Keputusan Pleno itu tertuang dalam Keputusan KPU No. 27 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Terpilih.

Tabel 3
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati

No Urut	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara	Peringkat
1	Drs. H. Masduki Sund, MM dan Drs. H. Syafi'i Asyari	Demokrat & PPP	114.677	Kempat
2	Ir. H.A. Wahyudi dan Ir. HM. Eko Sukartono	PKB	120.865	Ketiga
3	Ir. H. Soesanto Suwandi, MM dan Drs. H. Abdul Kadir, M.Si	Golkar	150.829	Kedua
4	H. Ali Sa'roni, SH, MM. dan Yusuf Widiyatmoko, S.Sos.	PDIP	94.454	Kelima
5	Ratna Ani Lestari, SE, MM dan Yusuf Nuris, SH, MH.	Gabungan Partai Non Parlemen	311.653	Pertama

Sikap pro dan kontra pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih muncul. Pendukung Bupati terpilih mendesak agar pelantikan segera dilakukan. Sementara pimpinan dan anggota DPRD menolak untuk mengadakan pelantikan karena pencalonan Bupati dan wakil Bupati terpilih dianggap bermasalah. KPUD telah memanipulasi data dalam pengisian formulir calon bupati dan wakil bupati terpilih. KPUD didesak oleh DPRD untuk membuka kembali file pendaftaran Ratna-Nuris, tetapi KPUD tidak mau melakukannya. Di samping itu, KPUD dianggap telah melanggar tahapan dan penetapan Pilkada dengan tidak membuat laporan kepada DPRD. Bahkan dukungan pencalonan terhadap Ratna -Nuris juga sudah dicabut oleh Gabungan Partai Politik Non-Parlemen (GPPNP) melalui gugatan *Class Action* dengan nomor gugatan: 53/Pdt.G/2005 PN.BWI. Jauh sebelum hari pemilihan, GPPNP telah mencabut pencalonan Ratna-Yusuf Nuris dari pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2005, dengan Nomor Pencabutan 008/GPPNP/V/2005, tertanggal 30 Mei 2005.

Penolakan elit politik lokal lebih disebabkan karena ketersinggungan politik. Hal ini diakui oleh A. Wahyudi dan sejumlah politisi dewan, yang mengatakan bahwa pemenang pilkada adalah pendatang baru yang sebelumnya tidak terlibat dalam proses-proses percaturan politik dan pembangunan di Banyuwangi. Wahyudi mengatakan: "Bupati terpilih adalah orang baru yang masuk Banyuwangi langsung mencalonkan bupati dan menang. Dia tidak pernah terlibat dalam pendidikan politik dan pendewasaan politik di Banyuwangi. Fenomena ini jelas menjadikan para pemain politik yang telah bertahun-tahun memikirkan dan berjuang untuk Banyuwangi yang lebih berhak untuk memimpin Banyuwangi menjadi tersinggung. Di samping itu, kemampuan calon bupati terpilih masih sangat ditragukan karena tidak mempunyai pengalaman di bidang manajemen politik dan pemerintahan yang memadahi", (Wawancara, 18 April 2006).

PELECEHAN AGAMA

Sikap penolakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga muncul dari Forum Ulama' Banyuwangi (FUB). Melalui surat yang disampaikan pada tanggal 27 Juli 2005 kepada DPRD, FUB menyampaikan tentang Data Status Kependudukan, Pelecehan Agama, dan Ayat al-Qur'an oleh Ratna Ani Lestari. Data dan bukti-bukti yang disampaikan FUB adalah:

(1) Ratna Ani Lestari dilahirkan di Banten pada 06 Desember 1965.
(2) Pada tanggal 14 Juni 1988 nikah Islam di Banyuwangi dengan I Gede Winasa

dengan surat nikah no. 159/43/VI/1988.

(3) Pada tanggal 14 Juni 1988 Ratna Ani Lestari masuk agama Hindu dengan diketahui kepala desa Tegal Cangkring Kecamatan Jembrana-Bali dan disaksikan oleh pengurus Hindu Darma I Wayan Sudiana.

(4) Pada tanggal 19 Agustus 2003 Camat Mendoyo Jembrana mengeluarkan KSK atas nama Ratna Ani Lestari tercatat sebagai penganut agama Hindu.

(5) KTP Ratna Ani Lestari yang dikeluarkan oleh camat Mendoyo Jembrana tanggal 13 Desember 2003 dan berlaku sampai 06 Desember 2005, Ratna Ani Lestari tercatat beragama Islam dengan KTP no.22.0201.461265.0001.

(6) Tanggal 24 Maret 2005 Ratna Ani Lestari dibaptis sebagai pemeluk Hindu oleh Ketut Sumaryono, SH sebagai pengurus Hindu Tegal Cangkring Jembrana.

(7) Ratna Ani Lestari menerbitkan surat Yasin dengan mengurangi 1 ayat (ayat 24) dan merubah arti ayat ke-9 dari surat Yasin untuk tujuan politiknya.

Melihat bukti-bukti di atas, Ratna Ani Lestari dengan jelas melalui KPUD Banyuwangi telah berbuat kebohongan publik serta telah mempermainkan dan melecehkan agama baik Hindu maupun Islam dan melecehkan al-Qur'an. Berdasar pada bukti-bukti tersebut, FUB menolak Bupati terpilih.

Dalam suasana yang masih pro dan kontra tentang terpilihnya pasangan bupati Ratna-Nuris, Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur, melantik Bupati Terpilih. Walaupun sudah dilantik, penolakan terus berlanjut. Pimpinan DPRD dan mayoritas anggota DPRD masih pada pendiriannya, yakni menolak bupati terpilih. FUB dan massa pengikutnya tetap menolak Bupati terpilih, Ratna Ani Lestari, dengan melalui pengerahan massa dan spanduk-spanduk provokatif yang dipasang di jalan-jalan strategis.

Para kiai menuduh bupati terpilih telah melecehkan agama. Emosi keagamaan telah mempengaruhi emosi kolektif individu dan masyarakat. Tokoh agama yang tergabung dalam Forum Silaturrahmi Ulama Banyuwangi (FSUB) bersama 150 massanya mengelar istighotsah di gedung DPRD, (Jawa Pos, 30 Agustus 2005). Begitu juga, Forum Elemen Masyarakat Banyuwangi (FEMB) yang dipimpin KH Ali Sudarji, juga mendesak pelantikan digagalkan. Alasannya terdapat 15 perkara hukum terkait dengan pilkada yang belum terselesaikan. Di antaranya, gugatan DPP PKB terhadap KPUD tanggal 4 April 2005, gugatan *class action* kelompok masyarakat kepada KPUD, laporan DPC PKB Banyuwangi kepada Polda Jawa Timur tentang penyalahgunaan wewenang dan keterangan palsu KPUD, dan laporan Panwas kepada Kapolres Banyuwangi tentang pelanggaran KPU dalam pelaksanaan Pilkada, (Jawa Pos, 14 September 2006).

Aksi penolakan terhadap Ratna semakin menemukan momentumnya ketika dalam pembuatan daftar satuan harga kebutuhan daerah Banyuwangi untuk menentukan besarnya APBD 2006 dicantumkan harga daging babi, sementara tidak mencantumkan harga daging sapi. Pemaparan daftar satuan harga Kabupaten Banyuwangi tersebut disampaikan di sidang paripurna DPRD. Standar harga pun bukan untuk masyarakat Banyuwangi, tetapi standar tinggi untuk kalangan turis. Dengan mudah orang menyimpulkan bahwa daftar harga kebutuhan pokok tersebut dicopy dari kabupaten Jembrana (kota dimana suami Ratna Ani Lestari, I Gede Winase, menjadi bupati). Kontan protes keras disampaikan oleh para anggota dewan tentang munculnya "harga daging babi" tersebut. Para ulama, kyai, dan umat Islam yang mengetahui informasi juga memprotes keras munculnya daftar harga tersebut. Bahkan menurut informasi, cop kertas yang digunakan dalam penyampaian daftar harga tersebut, masih tertulis salah satu kabupaten yang ada di Bali tersebut. Maka masyarakat Banyuwangi merasa tersinggung, selain pelecehan terhadap agama mayoritas di Banyuwangi, juga masyarakat mempertanyakan independensi pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Banyuwangi telah menjadi "plagiat" dan "bayang-bayang" kabupaten Jembrana. Ini jelas pelecehan terhadap martabat masyarakat Banyuwangi. Kepercayaan dan dukungan masyarakat Banyuwangi kepada Bupati terpilih melemah. Bahkan para pendukung Bupati menyesal telah salah memilih pemimpin dan mencabut dukungannya, (Wawancara, 17 April 2006).

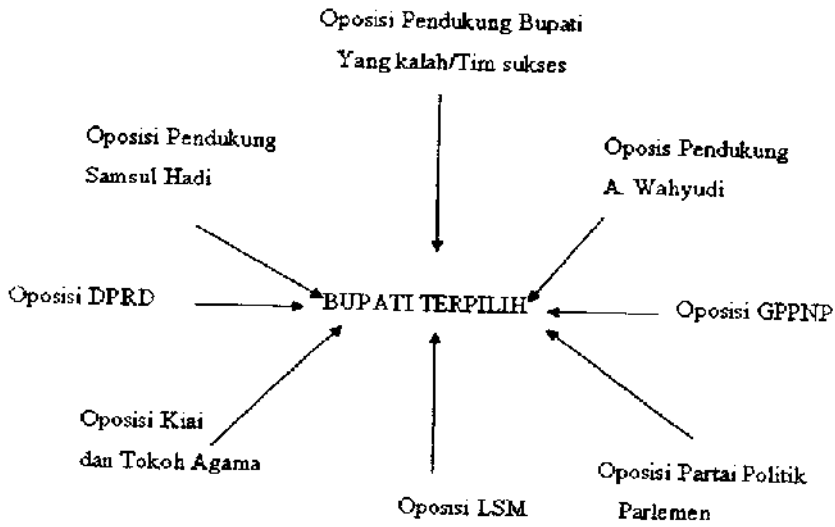
Para kiai yang kontra Bupati terpilih terus mematangkan aksi penolakannya. Lebih dari 100 kiai berpengaruh di Banyuwangi mengadakan pertemuan di rumah KH. Nuruddin di kecamatan Genteng. Isu yang digulirkan tidak lagi menolak pelantikan, tetapi beralih ke tema "menurunkan". Pertemuan terus digalang, tidak saja melibatkan kalangan kiai, tetapi juga melibatkan Ir. Syamsul Hadi (mantan bupati dan calon bupati yang ditolak oleh KPUD) dan juga Ir. A. Wahyudi (calon bupati yang tidak terpilih dan menjabat sebagai ketua DPRD Banyuwangi). Konflik mendalam antara Ir. Syamsul Hadi dan Ir. A. Wahyudi dalam persaingan cabup PKB seolah telah cair karena ada musuh yang perlu dilawan bersama. Keduanya kini berada dalam satu kubu menolak dan ingin menurunkan Bupati terpilih di tengah jalan.

Puncak dari gerakan ini adalah demo besar-besaran yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2006 yang diikuti ribuan pengunjuk rasa menuntut turun bupati Ratna Ani Lestari. Meskipun gerakan ini tidak berhasil memaksa turun Bupati, namun citra Bupati di tengah masyarakat Banyuwangi, saat ini, tengah merosot

jauh. Masyarakat telah hilang kesabaran dan kepercayaan. Janji-janji kampanye seperti sekolah gratis dan biaya kesehatan gratis belum terbukti. Belum lagi ditambah sikap dan kebijakan Bupati yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Banyuwangi, seperti kasus daging babi, melarang istighotsah, dan sebagainya, telah menyinggung perasaan masyarakat Banyuwangi. Makanya, sikap masyarakat yang dulu mendukung, sekarang mencabut dukungannya. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat yang menolak Bupati terpilih semakin kuat.

Kelompok-kelompok oposisi terhadap bupati terpilih terus merapatkan barisan. Tuntutan dari kelompok-kelompok oposisi dari berbagai kepentingan semakin menambah keruwetan dan mengarah pada sikap yang semakin jauh dari mekanisme konstitusi. Sebelum pelantikan wacana yang digulirkan kelompok oposisi adalah "tolak pelantikan", pasca pelantikan wacana yang dikembangkan menjadi "turunkan bupati atau turunkan Ratna". Mengantungnya situasi Banyuwangi pasca pelantikan membuat beberapa elemen masyarakat mendesak Ratna-Yusuf legowo mundur dari jabatannya.

Skema 2
Kelompok Oposisi Terhadap Bupati Terpilih



Kekuatan-kekuatan yang ketika Pilkada terlibat konflik dan saling bermusuhan, kini, kumpul menjadi satu kekuatan oposisi, karena ada musuh bersama yang perlu dihadapi. Kelompok-kelompok oposisi tersebut menuntut Bupati dan Wakil Bupati turun dari jabatannya. Singkatnya, posisi Ratna sekarang sangat terjepit, dan membuat posisinya sulit di pemerintahan maupun di masyarakat Banyuwangi.

Ada beberapa alasan bupati harus turun dari jabatannya: 1) hubungan yang tidak harmonis bupati dan DPRD menyebabkan program-program pembangunan terhambat. Hubungan yang tidak harmonis menyebabkan terhambatnya pembangunan dan pelayanan publik di Banyuwangi. Sebagai contoh, pengesahan APBD yang tertunda-tunda. Ini akan berakibat tidak baik bagi masyarakat Banyuwangi, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang pembangunan lainnya. 2) janji-janji politik bupati yang belum terlaksana, seperti sekolah gratis dan kesehatan gratis. 3) program pembangunan di bidang lingkungan yang dikemas dalam jargon "BIR" (Banyuwangi Ijo Royo-Royo), menyinggung pemeluk agama mayoritas Banyuwangi. Konotasi "BIR" adalah minuman keras yang diharamkan oleh agama Islam. 4) Komunikasi politik bupati yang jelek dengan masyarakat. Bupati sangat sulit diajak berdialog oleh masyarakat. 5). Pencantuman harga daging babi dalam satuan harga Banyuwangi, jelas akan melukai perasaan pemeluk agama di Banyuwangi yang mayoritas Muslim. Di samping itu, masyarakat juga tersinggung kalau Banyuwangi akan menjadi foto copy Jembrana, daerah dimana suami bupati Ratna Ani Lestari menjadi bupati. Politisi dan elit lokal mempertanyakan independensi bupati. Mereka berpandangan bupati Ratna hanya pegawainya bupati Jembrana, Winasc. 6) Kebijakan bupati Ratna Ani Lestari yang melatang doa bersama (*istiqhotsah*) bagi umat Islam, menyebabkan umat Islam Banyuwangi tersinggung.

Buntut dari perlawanan kekuatan oposisi ini, pada tanggal 4 Mei 2006, terjadi unjuk rasa besar-besaran ke kantor Bupati. Demo yang diikuti sekitar 10.000 pengunjuk rasa, di dampingi lebih dari 50 kiai dan pimpinan serta anggota DPRD. Ketua DPRD A. Wahyudi mengatakan, menurunkan Ratna Ani Lestari dari jabatannya merupakan kemauan masyarakat bukan semata-mata keinginan DPRD dan segelintir elit. "Memang Ratna saat itu dipilih rakyat, namun jika saat ini rakyat menghendaki Ratna turun, apakah itu bukan hak mereka, katanya. Keesokan harinya, DPRD mengadakan Rapat Istimewa mengajukan usulan pencopotan jabatan bupati dan telah dikirim ke Menteri

Dalam Negeri, yang kini tinggal menunggu hasilnya. Karena bupati tidak bisa lengser begitu saja sebelum Mendagri menyetujui usulan DPRD., (Wawancara, 18 April 2006).

MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK

Barbara J. Hill (1982), dalam studinya tentang proses resolusi konflik, mengajukan tiga pendekatan dalam resolusi konflik, yakni: pendekatan "*pengadilan, negosiasi*, dan *arbritrase*". Pendekatan ini oleh Hill disebut sebagai *metode konvensional* karena lebih mementingkan kehadiran pihak ketiga. Disebut metode konvensional karena metode ini lebih berbasis pada pendekatan legalistik.

Sementara Simon Fisher (dalam Sears dkk, 2003: 333), mengusulkan model *Interactive Conflict Resolutions* (IRC). Pendekatan ini memberi tekanan utama pada proses interaksi di antara para pihak. Asumsi dasarnya adalah "pemahaman terhadap konflik memerlukan perhatian terfokus terhadap langkah yang dipilih dan yang memungkinkan terjadinya interaksi antara para pihak yang berkonflik – pada berbagai tingkat yang berbeda-beda – sehingga tercapai kesepakatan secara bersama seperti perdamaian, keadilan, dan kesetaraan. Menurut Fisher, metode ini merupakan metode resolusi konflik informal dan sistematis tanpa kekerasan, (Manoppo: 2005, 88-97).

Penyelesaian konflik politik di Banyuwangi, lebih menekankan kepada pendekatan interaktif (dialog), mediator, dan legalistik. Melalui dialog, pihak-pihak terlibat konflik duduk bersama dalam suatu forum untuk menyelesaikan konfliknya. Melalui mediator, beberapa kali Gubernur Jawa Timur, organisasi keagamaan, dan Lembaga swadaya masyarakat menjadi mediator dalam penyelesaian konflik di Banyuwangi. Tetapi kedua upaya ini tidak sukses. Akhirnya, menempuh alternatif ketiga, yakni melalui pendekatan legalistik. Banyak sekali masalah yang berujung di pengadilan, dan pihak-pihak yang berkonflik menunggu keputusan hukum. Hal demikian juga diakui oleh Ketua KPUD, Ahmad Syakib, yang mengatakan bahwa "karena pelembagaan dan pengaturan konflik antar pihak-pihak yang berkonflik, maka kita sepakat dalam ketidaksepakatan (*agree in disagreement*). Konsensus-konsensus informal sangat sulit diwujudkan, karena itu setiap muncul persoalan di Banyuwangi banyak yang berujung ke pengadilan. Apa yang diputuskan oleh pengadilan itulah

yang dijadikan pegangan", (Wawancara, 20 April 2006).

Kenapa mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah, konsensus, interaksi, dan mediasi tidak jalan dalam menyelesaikan konflik yang terkait dengan Pilkada di Banyuwangi? Dalam persoalan ini, A. Wahyudi mengatakan bahwa pendekatan negosiasi, arbitrase, dan interaktif pernah dilakukan, tetapi hasilnya tidak ada. Ia mencontohkan, telah mengundang pihak-pihak yang berkonflik, tetapi selalu dicurigai ada motif-motif politik di baliknya. Akhirnya, menurut Wahyudi, yang terjadi ya proses pembiaran, biar reda-reda sendiri. Karena tidak ada kejujuran untuk saling terbuka antara pihak-pihak yang berkonflik. Duduk saja sudah saling curiga, jadi ya melalui pendekatan kekuasaan saja (*power*). Dalam konteks ini, pihak-pihak yang merasa dirugikan biar mengajukan gugatan ke pengadilan, dan biar pengadilan yang memutuskan", (Wawancara, 17 April 2006).

Walaupun masalah tersebut sudah diputus oleh lembaga peradilan, dalam pelaksanaannya banyak pelanggaran-pelanggaran. Keputusan pengadilan diabaikan begitu saja, tidak ditaati. Contohnya kasus putusan PTUN tentang dualisme PKB dan yang berhak mencalonkan bupati. Dalam tataran pelaksanaan, KPUD misalnya, tidak mentaati proses ini. Karena itu, walaupun mekanisme penyelesaian konflik Pilkada Banyuwangi lebih mengedepankan proses legalistik, tetapi dalam kenyataannya tidak bisa mengikat pihak-pihak yang berkonflik.

Dari realitas di atas, bahwa kedewasaan berpolitik elit lokal di Banyuwangi masih rendah. Perlu pembelajaran politik yang lebih baik lagi, baik untuk elit politiknya maupun masyarakat awam. Tanpa adanya pembelajaran politik yang baik, maka tidak akan ada kematangan sikap dalam berpolitik. Yang ada justru kian meningkatnya sikap mau menang sendiri pada kalangan elit lokal, baik elit politik maupun elit non politik, dan bisa berujung dengan kekerasan dan anarkhi.

KESIMPULAN

Atas dasar hasil analisis data penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut bahwa: *Pertama*, pola-pola konflik elit politik lokal dalam Pilkada di Banyuwangi melibatkan elit politik, elit non-politik, dan massa. Konflik yang bermula dari dualisme PKB, bergulir bak bola salju setelah KPUD bertindak

tidak bijaksana. Konflik berkembang tanpa dapat dibendung dan menyeret hampir semua elemen-elemen masyarakat di Banyuwangi, seperti partai politik, lembaga politik, birokrasi, kiai, dan masyarakat secara luas. Konflik menjadi *akut* atau *berlarut-larut,* karena di tingkat elit politik lokal, nuansa perebutan kekuasaan dan pengaruh terus berlanjut. Sementara di tingkat massa, konflik telah berkembang menjadi konflik yang berbau agama. Pola konflik pra Pilkada mencerminkan konflik elit karena perebutan kekuasaan. Pasca Pilkada, pola konflik di samping perebutan kekuasaan, juga dipicu oleh emosi keagamaan. Sejumlah kyai terlibat secara intensif dalam konflik karena tersinggung dengan kebijakan-kebijakan bupati yang dinilai bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

Kedua, Mekanisme pengelolaan konflik yang pernah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik adalah melalui pendekatan interaktif, mediator, dan legalistik. Melalui pendekatan interaktif, pihak-pihak yang berkonflik bertemu untuk membicarakan permasalahan di antara mereka melalui musyawarah. Tetapi cara ini akhirnya gagal karena antar pihak yang berkonflik dihinggapi perasaan saling curiga dan tidak ada niat baik untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi bersama. Melalui mediator, juga tidak membuahkan hasil. Kemudian, pihak-pihak konflik menempuh pendekatan ketiga, yakni pendekatan legalistik. Pihak-pihak yang berkonflik menunggu putusan lembaga peradilan atas konflik yang terjadi. Tetapi, lagi-lagi, cara ini tidak ampuh karena pihak-pihak yang berkonflik tidak mentaati keputusan lembaga peradilan. Akhirnya, pihak-pihak konflik sudah apatis, maka konflik dibiarkan saja, biar reda-reda sendiri, biar lupa dan bosan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Moekmina. 2003. "Konflik Kepentingan di DPRD Jawa Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur". Surabaya: Tesis S2 IIS Unair.

Nurhasim, Moch. 2005. *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suwarko, Andi. "Konflik Elit Lokal dalam Pemilihan Bupati Mojokerto". Surabaya: Tesis S2 IIS Unair.

Fisher, Simon dkk. 2000. *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, alih bahasa oleh S.N. Karikasari dkk. Jakarta: responden to Conflict and The British Council.

Haris, Syamsuddin (ed.). 2005. *Pemilu Langsung di tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia.

Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta: dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.

Miall, Hugh. 1999. *Contemporary Conflict Resolution, the Preventation, Management and Transformation of Deadely Conflict*. USA: Blacwell Publishing.

Peraturan Lengkap Plikada 2005. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang otonomi Daerah 2004. bandung: Citra Umbara.

Kompas, Sabtu, 30 April 2005

Kompas, selasa 3 Mei 2005

Kompas, 8 Juli 2005

Jawa Pos, Senin 6 Juni 2005

Jawa Pos, Kamis 26 Mei 2006

Jawa Pos, Rabu 5 Oktober 2005

Kompas, 8 Juli 2005

Jawa Pos, Kamis 22 September 2005

Jawa Pos, 18 oktober 2005

Jawa Pos, Selasa 30 Agustus 2005

Jawa Pos, Kamis 1 September 2005